

Aset/modal

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dapat dijelaskan pada tabel berikut :

NO.	JENIS BARANG / NAMA BARANG	JUMLAH
I	Bangunan dan Gedung	28
	a. Bangunan Kantor Pemerintah	1
	b. Tempat parkir	1
	c. Pagar keliling	2
	d. Gudang Alat Kontrasepsi	1
	e. Gudang Non Alkon	1
	f. Gedung PPT	1
	g. Mushola	1
	h. Garasi	1
	i. Perpustakaan	1
	j. Balai Penyuluh	17
	k. Rumah Negara Golongan III Type A/ Rumdin	1
II	Peralatan dan Mesin	3733
1	Alat-Alat Besar	2
	Portable Generating set	2
2	Alat-Alat Angkut	165
	Mobil	8
	Sepeda Motor	157
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	551
4	Alat Studio dan Komunikasi	59
	Screen Projector	5
	LCD Projector & Attachment	7
	Pesawat Telepon dan Telephone (PABX)	8
	Wireless	5
	Amplifier	1
	Handycam	2
	Camera	3
	Speaker aktif	4
	Facsimili	2
	Public Address	22
5	Alat-alat kedokteran	2.956
	KIE Kit, BKB Kit, Implant dll	2937
	Timbangan	19

NO.	JENIS BARANG / NAMA BARANG	JUMLAH
III	Jaringan Listrik	1
	Jumlah Total	3.762

Secara ketersediaan asset, sebagaimana besar kebutuhan asset Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal telah terpenuhi walaupun walaupun masih terdapat asset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat, beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan lagi (terutama asset-asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun).

Asset – asset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi. Terkait dengan asset – asset tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan terhadap asset – asset yang secara fungsi maupun nilai ekonomis berada di bawah kapitalisasi asset sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Penghapusan asset tersebut di ikuti dengan administrasi penghapusan asset-asset yang sudah tidak dipergunakan agar jumlah secara nominal tidak akan terakumulasi di dalam Neraca Dinas sedangkan secara riil barang tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan. Hal lain yang diperlukan dalam waktu dekat ini adalah adanya manajemen pengelolaan asset yang terkelola dengan baik, sehingga asset-asset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharannya maupun dari sisi administrasi asset.

Manajemen pengelolaan asset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan

keuangan di mana manajemen asset tersebut merupakan salah satu point terpenting dalam mencapai opini WTP sehingga setiap OPD mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP melalui manajemen asset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal. Beberapa sarana yang dibutuhkan dan belum ada adalah sbb : mobil operasional pelayanan rujukan bagi korban kekerasan serta rumah singgah bagi korban kekerasan. Di samping itu, sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi mengingat hal tersebut merupakan pendukung layanan kepada masyarakat, antara lain peralatan kantor serta klinik korban. Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja perangkat daerah yang optimal.